

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
PONOROGO**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Administrasi Niaga (Ekstensi)
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

RINI MARTINA
NIM. 000910202321

Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 06 MAR 2003
No. Induk :

S
Klass
338.6
MAR
C

Pembimbing :

I. Drs. POERWANTO, MA
NIP. 130 403 359

II. Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP. 130 472 794

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA (EKTENSI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2002**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Program (Ekstensi) Ilmu Administrasi Niaga pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2002

Pukul : 15.00- 17.00 WIB


Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


Drs. H. Hartono Djulianto

Sekretaris

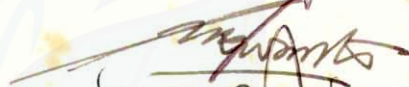

Drs. Poerwanto, MA

Anggota Penguji


1. Drs.H.Hartono Djulianto


(.....)

2. Drs. Poerwanto, MA


(.....)

3. Drs. Sutrisno, Msi


(.....)


4. Dra. Sri Wahyuni, Msi


(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



DEKAN


Drs. H. Moch. Toerki

NIP.130 524 832

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo”.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (SI) pada Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak. Rahmat Murjana.S, MM, selaku ketua Program Ekstensi Ilmu Administrasi Niaga.
3. Bapak Drs. Poerwanto, MA, selaku Dosen Pembimbing I ,yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, saran, dan nasehatnya.
4. Bapak Drs. Sutrisno, MSi, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan, saran, dan nasehatnya.
5. Semua Dosen dan Karyawan FISIP Universitas Jember.
6. Bapak Drs. Sunarto.SW, SH, MM yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian beserta seluruh karyawan PDAM Ponorogo yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jember November 2002

Penulis

Persembahan

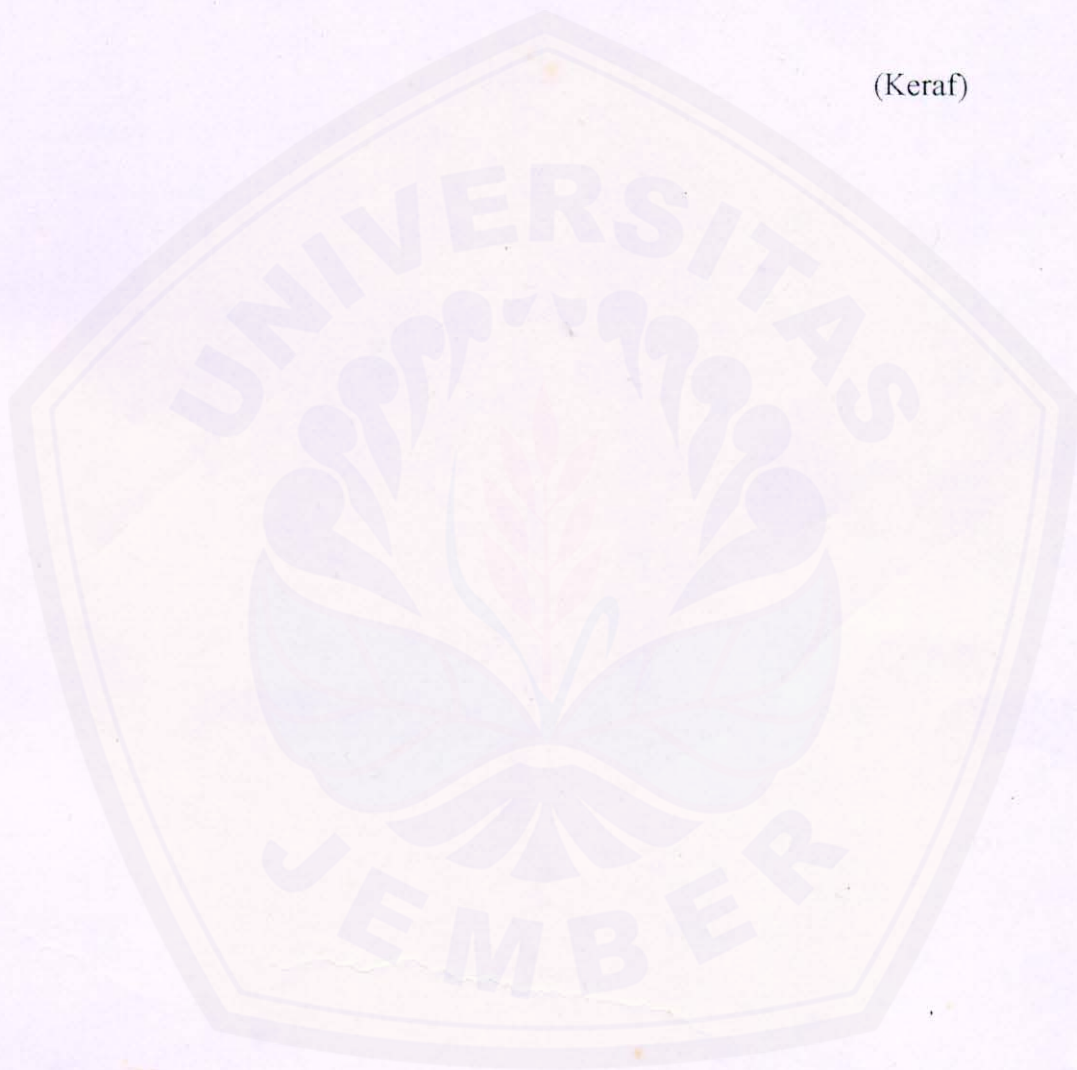
Dengan Segala ketulusan Hati Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Bapak Supriyanto dan Mamaku Emi Sutarmi , atas segala kasih sayang, pengorbanan dan Doa tulus yang selalu diberikan.
2. Bulik Ninik sekeluarga, terimakasih atas bantuannya selama ini.
3. Kakakku Shinta Febriyanti SP sekeluarga, terutama buat Si kecil Reza terima kasih atas semangat dan dorongan yang diberikan selama ini.
4. Adikku Ratih Yulianita, Trimakasih atas bantuannya selama ini.

MOTTO

Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang.

(Keraf)



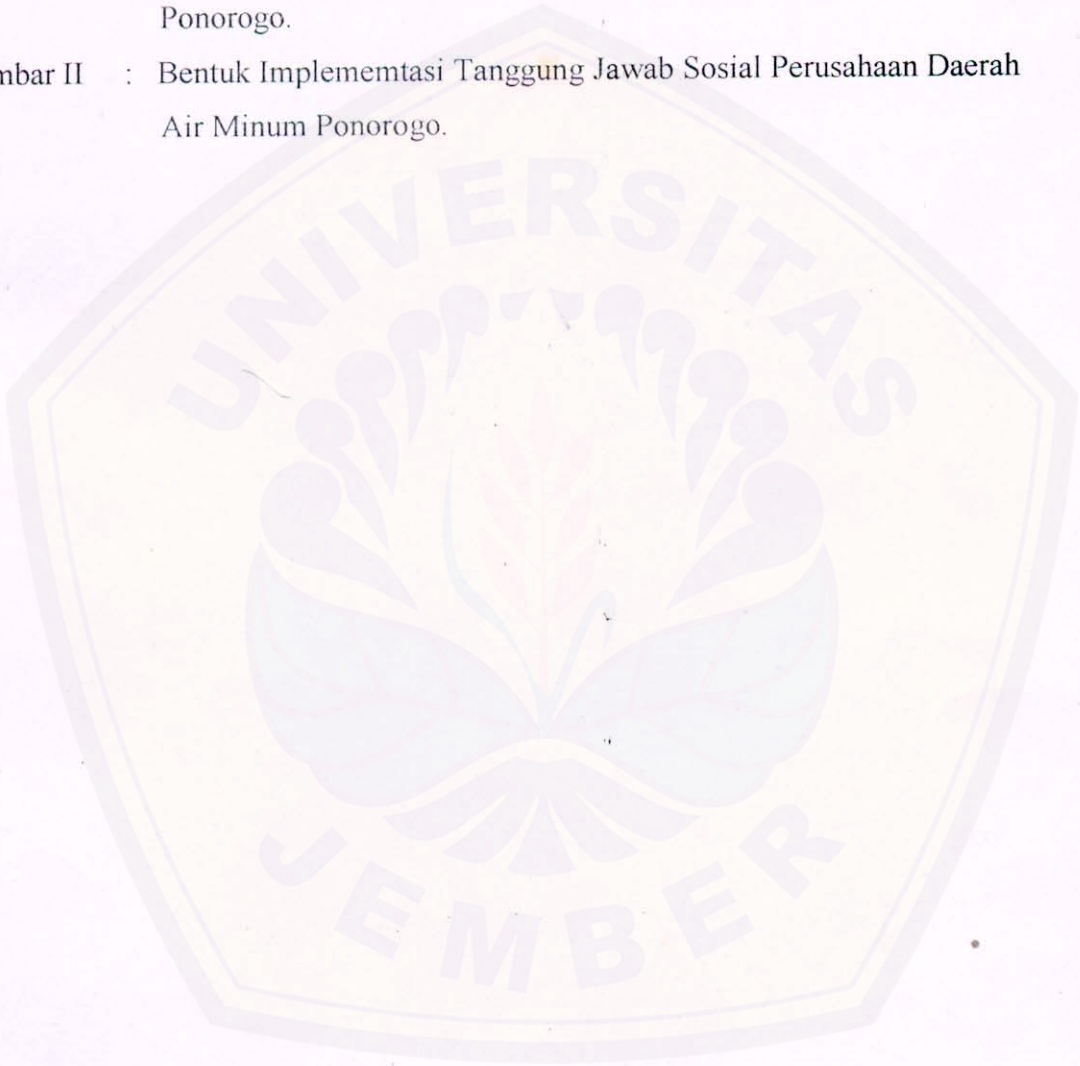
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.4 Landasan Teori.....	4
1.4.1 Organisasi.....	4
1.4.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	5
1.4.3 Bentuk tanggung Jawab Sosial Perusahaan	11
1.4.4 Kendala dan pemecahan Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan.....	12
1.4.5 Isi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	13
1.4.6 Sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	15
1.4.7 Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	18
1.4.8 Prinsip-prinsip Dalam Etika Bisnis.....	21
1.5 Metodologi Penelitian	22
1.5.1 Lokasi Penelitian	22
1.5.2 Jenis Penelitian.....	23
1.5.3 Karakteristik Informan.....	23
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26

1.5.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	26
1.5.6 Analisis Data.....	26
II. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	28
2.1 Sejarah Perusahaan.....	28
2.2 Lokasi Penelitian.....	29
2.3 Tujuan Perusahaan.....	29
2.4 Visi dan Misi Perusahaan.....	29
2.5 Struktur Organisasi.....	30
2.6 Kegiatan Personalia.....	38
2.6.1 Jumlah dan Jenjang Pendidikan Karyawan.....	38
2.6.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan.....	38
2.6.3 Sistem Gaji.....	39
2.6.4 Fasilitas Untuk Karyawan.....	40
2.7 Tata Tertib Disiplin Kerja Karyawan.....	43
2.7.1 Kewajiban Setiap Karyawan.....	43
2.7.2 Larangan Bagi Setiap Karyawan.....	44
2.8 Sistem Penyediaan Air Bersih.....	45
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
3.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo.....	47
3.1.1 Keterlibatan Perusahaan Dalam Kegiatan yang Berguna Bagi Kepentingan Masyarakat.....	49
3.1.2 Adanya Usaha Untuk Mendapatkan Keuntungan.....	51
3.1.3 Memenuhi Aturan Hukum yang Berlaku.....	55
3.1.4 Hormat Pada Hak dan Kepentingan <i>Stakeholders</i>	58
a. Karyawan.....	58
b. Konsumen.....	64
c. Masyarakat.....	66
d. Pemerintah.....	66
IV. KESIMPULAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo.
- Gambar II : Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo.



DAFTAR TABEL

Tabel I : Jumlah Karyawan PDAM Ponorogo menurut Tingkat Pendidikan

Tabel II : Jam Kerja Karyawan PDAM Ponorogo

Tabel III : Matrik Implementasi Tanggung Jawab Sosial PDAM Ponorogo



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Laporan Keuangan PDAM Ponorogo Tahun 2001
- Lampiran III Surat permohonan ijin mengadakan penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran IV Surat Keterangan selesai penelitian dari PDAM Ponorogo
- Lampiran V Jadwal mingguan pengiriman air tanki bulan Agustus kedaerah kekeringan
- Lampiran VI Foto Kantor PDAM Ponorogo serta foto-foto kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perusahaan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didalam menjalankan kegiatannya berada dalam suatu lingkungan usaha tertentu. Lingkungan sendiri tentu saja selalu berubah baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dan ini mempengaruhi kegiatan perusahaan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan operasi perusahaan. Perusahaan terlebih dahulu harus mampu menilai kekuatan dan kelemahannya disegala bidang maupun dalam fungsi manajemennya, sehingga hal-hal yang bersifat positif dan negatif yang terjadi baik diluar maupun didalam perusahaan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam penentuan tujuan, strategi, serta kebijaksanaan perusahaan.

Bisnis yang ingin bertahan dan berkembang pada era global sebaiknya mengubah paradigma tanggung jawabnya dari *Shareholders* atau para pemegang saham, menjadi tanggung jawab sosial kepada *Stakeholders* atau pemegang kepentingan atas perusahaan secara luas yakni pegawai, konsumen dan masyarakat dimana kegiatan bisnis itu berlangsung. Perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan global akan memberikan keuntungan lebih banyak, namun disisi lain juga menuntut sejumlah kewajiban-kewajiban dari perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan karena aspek ini merupakan syarat utama bagi berhasilnya perusahaan terutama untuk jangka panjang. Tanggung jawab sosial perusahaan berarti bahwa manajemen mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi didalam pengambilan keputusannya.

Dunia bisnis di Indonesia hendaknya dapat melakukan usaha-usaha nyata untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada seperti rendahnya kesejahteraan para buruh akibat upah yang rendah, timbulnya berbagai praktek

monopoli yang merugikan pengusaha kecil, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat adanya aktivitas industri yang tidak mengindahkan keseimbangan ekologi dan lain-lain. Hal tersebut sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosialnya didalam masyarakat Indonesia. Masalah-masalah sosial tersebut diatas tidak mungkin diatas oleh pemerintah sendiri terutama karena keterbatasan dan kelemahan aparat pemerintah. Karena itu kesediaan dunia bisnis untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sangat perlu demi kelangsungan usaha kalangan bisnis itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena diatas, maka perusahaan bisnis apapun baik yang memproduksi barang maupun jasa sangat perlu untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, karena pada dasarnya bisnis itu hadir untuk memberikan tanggapan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang berkualitas.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan sebuah perusahaan milik daerah yang bertugas untuk menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dapat menambah penghasilan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi pada nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti juga perusahaan-perusahaan lain pada umumnya, memiliki sasaran untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memelihara kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak bisa sepenuhnya dikelola secara bisnis karena perusahaan ini juga memiliki fungsi sosial yaitu fungsi pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab kepada konsumen atau pelanggan untuk memproduksi air yang bersih serta memberikan pelayanan yang baik. Perusahaan juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak karyawan, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya, dan membantu program-program pemerintah

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu maka perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku bisnis dimasa persaingan yang semakin ketat untuk melindungi kepentingan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan mengamati berbagai macam alasan tentang pentingnya tanggung jawab sosial bagi perusahaan, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo, maka kami tertarik untuk mengamati pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo (PDAM) Ponorogo.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang ingin diteliti adalah: **“Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo”?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui dan menggambarkan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

- a. Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam mengimplementasikan teori yang diterima dibangku kuliah.
- b. Sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Niaga.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi PDAM Ponorogo dan perusahaan lain dalam rangka meningkatkan atau melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Organisasi

Sebuah organisasi dibentuk dan didirikan oleh manusia dalam usahanya mencapai suatu tujuan. Penyelenggaraan dan pengendalian tujuan organisasi merupakan kegiatan yang dinamis, karena dalam prosesnya selalu dihadapkan pada suatu lingkungan yang setiap saat bisa berubah dan menjadi sebuah tantangan serta resiko dari sebuah proses dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Suatu organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi keadaan sekitarnya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya suatu organisasi merupakan suatu bagian dari suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem sosial. Gejolak dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini secara sadar atau tidak, sangat mempengaruhi kehidupan dari suatu organisasi pada masa yang akan datang. Hanya organisasi yang bisa beradaptasi secara tepat terhadap tuntutan lingkungan yang akan bisa mencapai keberhasilan. Oleh karena itu cara dan bentuk pengelolaan organisasi haruslah disesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Menurut Irawan, (1982:196) perusahaan akan selalu dinilai hasil kerjanya dari segi sosial (*social performance*), sedangkan lingkungan usaha mungkin berubah setiap waktu sehingga kemungkinan saja terjadi orang lebih menilai tinggi perusahaan apabila perusahaan tersebut berhasil menjalankan misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak semata-mata mendapatkan keuntungan.

Menurut Marguiles (Dalam Indrawijaya 1983:16), peranan organisasi dalam masyarakat akan berubah. Perusahaan tidak lagi hanya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan karena perusahaan dituntut untuk mendapatkan keuntungan yang wajar dan juga memberikan kemanfaatan sosial, seperti melindungi lingkungan hidup, memberikan lapangan kerja, dan sebagainya. Setiap organisasi perlu memberikan perhatian terhadap aspek pertanggungjawaban atas kehadiran dan kehidupannya dalam masyarakat, juga memberikan pertanggungjawaban atas kegiatannya kepada para anggota organisasi itu sendiri. Produktivitas kerja akan dipertanggungjawabkan baik pada masyarakat maupun mereka yang berada didalam organisasi tersebut.

Perusahaan dikatakan sebagai organisasi bisnis, hal ini disebabkan perusahaan memiliki tujuan sebagaimana tujuan bisnis yakni mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian atau tidak semudah yang diduga. Pelaku-pelaku bisnis hidup didalam masyarakat dimana kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga terjadi interaksi yang dapat menciptakan keuntungan dalam arti luas. Oleh karena itu pada perkembangannya dikenal apa yang disebut tanggung jawab sosial bisnis.

1.4.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan sebagai sebuah organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan. Tidak ada satu perusahaanpun yang dapat mengelak dari kewajiban untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Salah satu bentuk kepedulian suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya adalah kesediaan perusahaan tersebut menunaikan kewajiban sosialnya. Penunaian kewajiban sosial itu dapat mengambil berbagai format seperti keterlibatan perusahaan dalam kegiatan kemasyarakatan, penyediaan fasilitas umum, pemeliharaan kebersihan lingkungan, juga memelihara suasana agar tidak timbul kesan bahwa ada kesenjangan sosial antara para karyawan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Singkatnya perusahaan perlu menampilkan citra bahwa perusahaan memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Perusahaan akan dipandang dan diperlakukan sebagai perusahaan yang layak mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat, bukan hanya masyarakat sekitar yang dekat akan tetapi masyarakat sebagai keseluruhan.

Hughes dan Kapoor (1985: 24) mengatakan : Tanggung jawab sosial adalah pengakuan perusahaan bahwa kegiatan bisnis memiliki dampak pada masyarakat. Berbagai dampak tersebut menjadi acuan dalam pengambilan kebijaksanaan operasional perusahaan.

Sedangkan Mirza & Sulistyarini (dalam Usahawan 1997:42) mengatakan: Tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat tetapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan komunitas dimana mereka berada.

Dari dua definisi di atas dapat dimengerti bahwas suatu perusahaan disebut bertanggung jawab secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya sekedar merealisasikan profit, tetapi juga suatu visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini merupakan konsep yang tidak semata-mata bermakna ekonomistik tetapi juga mengandung rasa aman dan tentram. Secara normatif perusahaan perlu mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya terhadap lingkungan (sosial maupun fisik), karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan tersebut diluar mekanisme pasar. Tetapi harus diakui bahwa pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebenarnya menguntungkan perusahaan, dan bahkan dengan kejelian menjadi peluang bisnis yang pantas diperhitungkan.

Menurut Hughes dan Kapoor (1985:36-37) tanggung jawab sosial dari bisnis meliputi tiga hal penting yaitu: *Pertama*, Kondisi pekerjaan. Hal ini berkenaan dengan masalah kondisi tempat kerja, kondisi sosial ekonomi karyawan, dan kondisi hubungan antar personal, maupun hubungan dalam kerja. *Kedua*, adalah hak-hak pelanggan. Bisnis harus memperhatikan hak-hak pelanggan, seperti hak untuk mendapat kepuasan, perlindungan dan pertanggung jawaban atas transaksi. *Ketiga*, adalah Kebijakan pemerintah. Semua kegiatan bisnis harus mampu mendukung kebijakan pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan bisnis tersebut. Maksudnya adalah bisnis yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian suatu negara. Jadi kegiatan bisnis harus ikut bertanggung jawab terhadap program-program pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi masalah perekonomian.

Menurut Nusantara (Dalam Usahawan 1992:13), di Indonesia pengertian tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan alasan-alasan yang mendukungnya sudah semestinya didasarkan pada realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian tanggung jawab sosial perusahaan tidak semata dipahami sebagai sesuatu yang legalistik, yaitu karena hal itu tertuang di dalam pasal 27 dan 33 UUD 1945 dan Pancasila tapi kita pahami sebagai tuntutan sosial

dari masyarakat kita. Dalam pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Ini berarti bahwa negara menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Tiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu negara Indonesia tidak hanya mengatur agar setiap warganya memperoleh pekerjaan, tetapi lebih dari itu, negara mengatur agar setiap warganya juga memperoleh penghidupan yang layak yang diperoleh melalui upah/gaji yang diterima dari pekerjaannya. Sedangkan dalam pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan lain yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini menggambarkan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Francisia (1992:13) tanggung jawab sosial lahir dari suatu landasan moral dan dasar berfikir bahwa manusia adalah makhluk sosial. Moral biasanya dikaitkan dengan tindakan seseorang benar atau salah. Moral atau etika berupaya untuk menentukan tujuan dan makna kehidupan serta menunjukkan kepada manusia cara-cara untuk mencapai tujuan hidup. Masalah moral yang dihadapi oleh manusia, baik sebagai individu maupun kelompok memerlukan dukungan berbagai ilmu sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial yang sangat kompleks, mau tidak mau ia berinteraksi dengan orang lain karena manusia tidak dapat hidup dan bertahan tanpa adanya bantuan dan interaksi dengan manusia-manusia lain. Agar interaksi tersebut dapat memperkaya kehidupan seseorang, yang bersangkutan harus siap terikat pada norma-norma moral dan etika yang berlaku dan karena itu pulalah maka iapun memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama manusia, begitu juga halnya dengan perusahaan.

Sebuah perusahaan secara umum tergantung pada masyarakat umum (publik) sebagai konsumen hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa . Tergantung pada perusahaan-perusahaan lain, tergantung pada karyawan dan buruh yang bekerja untuk menghasilkan produknya, tergantung pada pemerintah

untuk mendapatkan ijin usaha, dan juga tergantung pada masyarakat setempat dimana perusahaan itu berada demi kelancaran dan keamanan berproduksi maupun berusaha. Akibat adanya kesadaran akan ketergantungan pada berbagai pihak untuk melancarkan usahanya ini maka para pengusaha secara sadar melakukan tanggung jawab sosialnya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan perusahaan menuntut diberlakukannya etika bisnis. Bisnis merupakan usaha yang dikelola oleh individu-individu untuk memproduksi dan menjual barang-barang/jasa dan mendapatkan keuntungan dengan jalan memberikan kepuasan akan kebutuhan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan bisnis adalah mencari keuntungan. Namun selain itu juga terdapat tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memuaskan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat secara memuaskan ini merupakan salah satu implementasi fungsi sosial, dimana didalamnya terkandung suatu tanggung jawab sosial untuk melaksanakan fungsi sosial tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab sosial tersebut Friedman (Dalam Cannon, T 1995:40) mengatakan:

“Hanya ada satu tanggung jawab sosial dari bisnis, menggunakan sumberdaya yang terikat dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan sepanjang hal ini sesuai dengan aturan permainan, persaingan yang terbuka dan bebas tanpa tekanan atau kekuatan”.

Ini berarti perusahaan didalam mencapai tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan hal yang wajar selama kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar aturan. Dengan meraih keuntungan itu kelangsungan usaha dapat dipelihara sehingga bisa terus menerus memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisa pula terus membayar upah dan gaji kepada buruh dan karyawan perusahaan. Dengan laba sebagai sumber motivasi, maka perusahaan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan produk-produk perusahaan. Dengan kegiatan usaha, perusahaan bisa memberikan upah dan gaji. Dalam kaitannya dengan perekonomian nasional, laba adalah sumber pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakat.

Keuntungan dalam bisnis merupakan bagian yang terpenting dalam proses kelangsungan hidup perusahaan. Pada kenyataannya keuntungan dalam bisnis tersebut bukanlah keuntungan finansial semata, tetapi keuntungan tersebut dapat berupa image atau citra perusahaan.

Konsep tanggung jawab sosial dimasyarakat terus mengalami pergeseran dari arti sempit (*Shareholders approach*) kepada arti yang luas (*Stakeholders approach*). Artinya dalam konsep yang bertanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi diperuntukan bagi *shareholders* atau pemilik saham perusahaan tapi juga diperuntukan bagi *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. *Stakeholders* meliputi penyandang dana, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan karyawan. Kelompok-kelompok tersebut sangat berpengaruh terhadap perusahaan dan dapat melakukan tekanan terhadap dampak aktivitas perusahaan. Pergeseran konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari *shareholders* ke *stakeholders* terjadi karena pergeseran lingkungan bisnis, dimana kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor intern perusahaan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekstern seperti lingkungan, sosial budaya, teknologi, hukum, ekonomi atau keuangan, kompetisi dan politik dunia lokal.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan perusahaan menuntut diberlakukannya etika bisnis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis itu pada umumnya datang dari lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu bisnis tidak lepas dari beban biaya yang kadang-kadang cukup besar jumlahnya. Selain ada dorongan dari luar pelaksanaan etika bisnis juga muncul dari dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bisnismen juga manusia, karyawannyapun juga manusia yang lengkap dengan rasa, karsa, dan karya. Oleh karena itu mereka sering terdorong rasa kemanusiaannya untuk menerapkan etika bisnis secara jujur.

Menurut Gitosudarmo (1992:42) agar manajemen puncak meraih keberhasilan dalam menjalankan roda perusahaan, pengetahuan, ketrampilan serta kemampuan yang dimilikinya harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan menyusun strategi perusahaan yang mencakup penunaian berbagai kewajiban

sosial. Apabila manajemen tidak memperhatikan bentuk dan jenis kewajiban sosial yang harus ditunaikannya, perusahaan yang dipimpinnya akan mengalami kegagalan. Penekanan kembali mengenai hal ini didasarkan pada tiga alasan tentang mengapa manajemen harus memperhitungkan dampak dari berbagai keputusan yang diambilnya terhadap kepentingan masyarakat luas. *Pertama*, Para manajer profesional dewasa ini semakin menyadari bahwa legitimasi keberadaannya sangat tergantung pada ketanggapannya atas berbagai bentuk tanggung jawab sosial, baik dalam arti politis, ekonomis, hukum, sosial budaya, moral maupun etika. Berarti manajemen berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya kepada berbagai pihak yang berkepentingan eksternal dan tidak langsung dan tidak terbatas hanya pada pihak internal. *Kedua*, Manajemen tidak lagi dibenarkan untuk menempuh jalan pintas dalam upaya mencapai tujuan seperti perolehan keuntungan dengan mengabaikan tanggung jawab sosialnya karena jika cara tersebut dipilih pemerintah akan ikut campur tangan melalui wewenang pengaturan yang dimilikinya karena dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, menunaikan kewajiban sosial sesungguhnya adalah demi kepentingan perusahaan. Karena manajemen akan berhasil menampilkan citra yang positif yang akan menumbuhkan dan memperbesar kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula dengan perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) tidak bisa hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaanpun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lain. Bahkan lebih dari itu, perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepekinagan hidup bersama didalam masyarakat.

1.4.3 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

Seperti telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan penjabaran dari kepedulian sosial dari suatu bisnis. Dengan semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu bisnis berarti semakin meningkat pelaksanaan praktek bisnis etik dalam masyarakat.

Menurut Gitosudarmo (1992:52) beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang dapat dilakukan oleh beberapa pengusaha khususnya di Indonesia meliputi:

- a. Pelaksanaan hubungan Industrial Pancasila.
Banyak pengusaha yang telah menyusun dan melaksanakan hubungan industrial pancasila ini dalam bentuk yang sering dikenal sebagai kesepakatan kerja bersama (KKB). KKB ini merupakan pedoman tentang hubungan antara pengusaha dengan karyawan. Didalam KKB ini disebutkan berbagai ketentuan tentang hak serta kewajiban karyawan. Kewajiban karyawan sudah jelas yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya. Sedang hak-hak karyawan meliputi hak atas gaji maupun bentuk-bentuk lain yang berupa kesejahteraan moril maupun materiil seperti hak cuti, uang lembur, bonus, THR, tunjangan kesehatan, pengembangan bakat serta kehidupan agama dan kerohaniannya.
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Wujud nyata dari AMDAL ini tercermin dalam pelaksanaan pengolahan limbah industri sedemikian rupa sehingga limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan. Dalam hal ini masih banyak para pengusaha yang belum menyadari akan tanggung jawabnya terhadap pengolahan limbah industri . Hal ini karena kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pencemaran lingkungan.
- c. Penerapan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Penerapan prinsip K3 ini telah banyak dilaksanakan oleh pengusaha kita. Untuk menjalankan praktek K3 ini tentu saja memerlukan banyak peralatan pelindung bagi para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya baik berupa topi pengaman, masker maupun pakaian kerja khusus lainnya.
- d. Sistem Bapak Angkat- Anak Angkat.
Pelaksanaan sistem ini banyak membantu kelancaran proses pembangunan bangsa serta keterikatan industri maupun keterikatan kepentingan masyarakat banyak. Hal ini memerlukan kesadaran yang tinggi dari pengusaha besar untuk membantu perkembangan pengusaha kecil.

Dari beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial diatas, diharapkan para pengusaha khususnya di Indonesia melaksanakan etika berusaha secara konsekuen yaitu mempertahankan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pihak-pihak lain baik pihak internal maupun pihak eksternal,

menjadi pengusaha yang profesional dengan karakteristik mementingkan masyarakat, walaupun motifnya tetap keuntungan, akan tetapi tanggung jawab sosialnya menonjol.

1.4.4 Kendala dan Pemecahan Dalam Pelaksanaan Ide Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

a. Kendala Dalam Pelaksanaan Ide Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Perusahaan terdiri dari orang-orang/ manusia yang memiliki berbagai macam karakteristik. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya konflik internal perusahaan ketika muncul suatu ide atau gagasan dari pihak manajemen untuk diterapkan dalam perusahaan tersebut. Konflik itu juga terjadi pada saat manajemen mengeluarkan ide tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Gagasan internal yang bertentangan ini antarlain pemegang saham ingin deviden yang tinggi, karyawan minta kenaikan gaji dan konsumen menuntut servis yang prima. Oleh karena itu sebelum ide tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial itu dilaksanakan maka terlebih dulu pihak manajemen perusahaan harus berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada tersebut agar kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

b. Pemecahan Dalam Pelaksanaan Ide Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Agar terdapat kesamaan pandangan mengenai ide tanggung jawab sosial maka konflik-konflik yang terjadi didalam perusahaan tersebut harus segera diatasi. Adapun cara yang dapat digunakan menurut Michael (1992:23) adalah dengan menggunakan komunikasi. Para pemodal perlu dijelaskan bahwa biaya untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan investasi yang efeknya baru terasa dalam jangka panjang. Hal tersebut memang tidak mudah menjelaskannya butuh waktu, proses dan pengertian. Tiap perusahaan akan memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakannya. Tidak ada yang general, universal atau standart dalam hal ini.

Menurut Robert (Dalam Hutomo Sigit, 1997:152) pemecahan dalam menanggapi isu-isu sosial tersebut adalah dengan pendekatan *stakeholders*. Dalam

hal ini perusahaan harus mampu menyelektasikan permintaan atau kepentingan yang saling bertentangan dari *stakeholders*, baik *stakeholders* internal (Pemilik atau pemegang saham, karyawan, manajemen) maupun dari *stakeholders* eksternal (Konsumen, YLKI, Investor, Kreditur, LSM termasuk pecinta lingkungan, pemerintah termasuk BAPEDAL dan lembaga lingkungan).

1.4.5 Isi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Isi tanggung jawab sosial perusahaan hanya bisa dilihat dalam kaitannya dengan relasi perusahaan atau bisnis dalam perusahaan itu. Ada dua jalur tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan dua jalur relasi perusahaan dengan masyarakat, yaitu relasi primer dan relasi sekunder.

Menurut Keraf (1990: 97-98) isi tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. Terhadap relasi primer: Misalnya, memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhkan janji, membayar hutang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dan menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan ketrampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya.
- b. Terhadap relasi sekunder: Bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti: Lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak, dan sebagainya.

Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis adalah keterlibatan perusahaan atau bisnis dalam mengusahakan kebaikan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomis. Menurut Keraf (1998:122) tanggung jawab sosial ini dapat di rumuskan dalam dua wujud:

- 1) Positif: Artinya perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera. Bahkan secara positif perusahaan diharapkan ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan berdasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial masyarakat.
- 2) Negatif: Artinya perusahaan harus menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga tidak sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Sedangkan menurut Nusantara (Dalam Usahawan 1992:13) tanggung jawab perusahaan memiliki konkretisasi makna yang beragam antara lain:

- 1) Membuat suatu produk yang aman untuk digunakan.
- 2) Membayar pajak sesuai dengan porsi keuntungan yang mereka peroleh.
- 3) Membersihkan pencemaran udara dan air yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis mereka.
- 4) Menjadi warga yang baik dari masyarakat tempat mereka beroperasi.
- 5) Membayar upah karyawannya secara layak.

Terlepas dari keragaman pemaknaan tanggung jawab sosial perusahaan, pada umumnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang diterima oleh banyak pengusaha baik di negara maju maupun dinegara berkembang. Masih menurut Nusantara (Dalam Usahawan 1992:13) bahwa penerimaan konsep tanggung jawab sosial tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Para pengusaha perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan itu beroperasi. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut perusahaan akan memperoleh lingkungan sosial yang baik yang diperlukan bagi kelancaran jalannya perusahaan.
- (2) Menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan akan membantu menaikkan citra dan gengsi perusahaan dimata publik atau masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu marketing pruduk perusahaan tersebut.
- (3) Bisnis sebagai suatu institusi akan terancam, jika dia gagal memenuhi harapan umum masyarakat.
- (4) Kalangan bisnis terdiri dari orang-orang yang dibimbing oleh nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Karena itu tanggung jawab sosial yang terkandung dalam nilai-nilai itu tidak mungkin dilalaikan begitu saja oleh bisnis, terutama jika bisnis ingin memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Dari alasan-alasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sesungguhnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk melindungi bisnisnya dengan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait, sehingga pada akhirnya dapat mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

1.4.6 Sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selalu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Oleh karena itu perusahaan perlu menganbil langkah-langkah respensif sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkannya. Menurut Keraf (1998:63-65) tanggung jawab perusahaan meliputi tanggung jawab sosial kepada:

- a. Karyawan.
Setiap karyawan yang bekerja untuk kehidupannya memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan yang sesuai dan dihargai atas dasar kemampuan dan kinerjanya.
- b. Konsumen.
Konsumen merupakan pelaku yang sangat menentukan dalam bisnis. Oleh karena itu hak-hak konsumen harus diperhatikan yaitu: Hak akan keselamatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan.
- c. Pemerintah.
Pemerintah terlibat dalam kegiatan bisnis dari hari ke hari dalam rangka menetapkan batas-batas aktivitas bisnis.
- d. Lingkungan masyarakat disekitar perusahaan
Perusahaan merupakan kreasi atau ciptaan dari masyarakat karena itu perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis harus mengembalikan sesuatu kepada masyarakat tersebut.

1). Karyawan.

Berkaitan dengan hal ini, Siagian (1996:57) mengatakan bahwa "...berangkat dari definisi klasik manajemen yang mengatakan bahwa manajemen merupakan kiat untuk memperoleh hasil melalui orang lain". Yang dimaksud dengan orang lain antara lain adalah para bawahan yang dalam hierarki organisasi berada pada anak tangga yang paling bawah dan bertanggung jawab atau bertugas menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sifatnya teknis operasional, baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok organisasi maupun tugas-tugas penunjang atau pendukung.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa peran karyawan begitu besar dalam pencapaian tujuan dan berbagai sasaran pada tingkat yang dominan ditentukan oleh kemampuan, ketrampilan, dedikasi loyalitas disiplin kerja, efisiensi kerja, produktifitas kerja, dan ketrampilan perilaku dari seluruh tenaga pelaksana berbagai kegiatan operasional. Oleh karena itu perusahaan harus

memberikan timbal balik pada karyawan. Hak-hak para karyawan harus diakui, dihargai, dan dipenuhi oleh perusahaan sebagai wujud dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada karyawan.

Menurut Siagian (1996:178) hak-hak karyawan yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

- a) Pengakuan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b) Sistem imbalan yang adil dan wajar serta setara dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan lain yang bergerak dalam kegiatan bisnis sejenis dikawasan yang sama.
- c) Penugasan yang menarik.
- d) Pemberdayaan dalam kekaryaan antara lain melalui partisipasi pengambilan keputusan yang menyangkut tugas pekerjaannya.
- e) Lingkungan kerja yang sehat dan aman.
- f) Peningkatan mutu hidup kekaryaan.
- g) Penilaian kinerja yang didasarkan pada tolak ukur yang rasional dan objektif.
- h) Penyediaan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan.
- i) Dukungan organisasi dalam hal yang bersangkutan menghadapi berbagai masalah ditempat kerja dan bahkan mungkin yang sifatnya pribadi.

Adalah hal yang wajar bila perusahaan memberikan hak-hak karyawan karena dengan pemberian hak-hak tersebut akan memberikan kepuasan pada mereka. Kepuasan ini merupakan motivasi yang dapat meningkatkan produktifitas kerja yang akhirnya memberikan keuntungan bagi perusahaan.

2). Konsumen

Berkaitan dengan tanggung Jawab sosial perusahaan pada konsumen, Kennedy (Dalam Engel dan Miniard,1995: 465) menyatakan bahwa konsumen memiliki empat hal dasar yaitu:

- a) Hak akan keselamatan.
Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari produk yang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan.
- b) Hak untuk mendapatkan informasi.
Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari informasi, iklan, pelabelan, atau praktek lain yang curang atau menipu dan menyesatkan untuk diberi fakta yang ia perlukan guna membuat pilihan berdasarkan informasi.
- c) Hak untuk memilih.
Konsumen memiliki hak untuk memilih yang terbaik baginya dengan berbagai produk yang ditawarkan dipasar.

d) Hak untuk didengar.

Konsumen memiliki hak untuk diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan mendapatkan perhatian penuh dari perusahaan, artinya perusahaan harus memenuhi permintaan konsumen.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman, bermutu dan terpercaya, iklan yang jujur secara normatif sehingga konsumen akan dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya.

3). Pemerintah.

Berkaitan dengan lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah adalah bahwasannya perusahaan tergantung pada pemerintah dalam menjalankan usahanya dalam hal ijin usaha dan dalam rangka menetapkan batas-batas aktivitas bisnis. Lebih lanjut Siagian (1996:69) mengatakan "...Hubungan yang serasi antara dunia bisnis dengan pemerintah mutlak perlu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat dengan masing-masing pihak menyelenggarakan fungsinya masing-masing dengan baik". Perusahaan memiliki fungsi menjalankan aktivitas bisnisnya, sedang pemerintah melaksanakan fungsi pengaturan yang diselenggarakan demi kepentingan masyarakat luas. Karena keberadaan perusahaan berada dalam naungan pemerintah suatu negara, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagai wujud tanggung jawab sosialnya kepada pemerintah. Salah satu wujudnya adalah dengan menaati peraturan-peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan.

4). Masyarakat.

Menurut (Cannon T 1995:34) ada kontrak yang bersifat implisit atau eksplisit antara bisnis dan masyarakat di sekitarnya. Bisnis dapat menciptakan kemakmuran, mengisi pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan persaingan serta memelihara masyarakat disekitarnya. Hal ini yang penting bagi

masyarakat adalah penciptaan lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dunia bisnis dituntut memahami perkembangan baru dalam pola hubungan interaksi antara dunia bisnis, pemerintah, dan berbagai organisasi nirlaba dan individu didalam masyarakat. Semakin maju umat manusia, semakin disadari pentingnya kebersamaan. Faktor penentu yang sangat dominan peranannya dalam memelihara kebersamaan adalah serangkaian kewajiban yang sifatnya timbal balik dan melembaga dan harus ditunaikan oleh berbagai komponen yang terdapat dalam masyarakat. Ketersediaan menerima tanggung jawab dan kewajiban itu ada kalanya hanya dinyatakan secara implisit, meskipun tidak jarang pula dilakukan secara eksplisit, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.

1.4.7 Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Sampai saat ini menurut Keraf (1998:123) ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai hal-hal yang termasuk dalam lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

a. **Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.**

Keterlibatan perusahaan didalam berbagai kegiatan yang berjujuan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bentuk dan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan diharapkan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi keuntungan semata, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan ikut serta melakukan berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut beragam misalnya menyumbangkan dana untuk membangun tempat ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat memberikan santunan bagi keluarga yang kurang mampu, dan lain sebagainya.

Menurut Keraf (1998:124) ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial tersebut. *Pertama*, Karena perusahaan dan seluruh karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat, jadi wajar bila merekapun harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat tersebut. *Kedua*, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada didalam masyarakat tersebut. Demikian pula sampai tingkat tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan semacam balas jasa terhadap masyarakat. *Ketiga*, dengan keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan masyarakat luas, perusahaan juga merasa mempunyai kepedulian, mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. *Keempat*, dengan keterlibatan sosial perusahaan menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Hal ini berarti keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial juga akhirnya membawa dampak yang positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan ditengah masyarakat tersebut.

b. Adanya Usaha Untuk Mendapatkan Keuntungan Ekonomis.

Keuntungan ekonomis menurut Friedman (Dalam Nusantara, 1992:12) merupakan tujuan utama bagi tanggung jawab sosial dari perusahaan. Satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bila seorang pengusaha mampu mengejar profit yang tinggi maka dengan sendirinya ia akan mampu melakukan akumulasi modal. Modal yang terakumulasi ini dapat digunakan untuk memperluas usaha atau membuka usaha baru, yang berarti terbukanya lapangan kerja baru.

Dalam hal ini keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Artinya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengejar keuntungan ekonomi karena hanya dengan itu perusahaan dapat dipertahankan dan juga dengan keuntungan

ekonomis semua karyawan dan semua pihak yang terkait dapat dipenuhi hak dan kepentingannya.

c. **Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat baik yang menyangkut kegiatan bisnis maupun kehidupan sosial.**

Menurut Keraf (1998:126) sebagai bagian integral dari suatu masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Salah satu bentuk yang konkrit dari upaya menjaga ketertiban dan keteraturan sosial dari pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Hal yang sama secara khusus berlaku dalam kaitan dengan aturan bisnis. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menjaga agar bisnis berjalan secara teratur, tidak hanya demi kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan iklim bisnis dan keadaan sosial. Salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan mematuhi aturan bisnis yang ada.

d. **Hormat pada kepentingan Stakeholders atau pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan langsung / tidak langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan.**

Stakeholders merupakan suatu lingkup tanggung jawab sosial yang harus semakin mendapat perhatian dari kalangan praktisi bisnis dan juga para ahli etika bisnis. Suatu cara yang dapat ditempuh adalah dengan pendekatan *Stakeholders*. Menurut Keraf (1998:89) pendekatan *Stakeholders* adalah cara mengamati dan menyelaraskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Setiap keputusan dan tindakan bisnis yang diambil tidak boleh merugikan hak-hak dan kepentingan satupun dari pihak-pihak yang terkait tersebut. Pada akhirnya pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dan pihak yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis bisa dijamin, diperhatikan dan dihargai. Dalam kegiatan bisnisnya suatu perusahaan harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak-pihak tersebut yaitu: konsumen, karyawan, investor, pemasok, masyarakat setempat, pemerintah dan lain sebagainya. Perusahaan tidak boleh merugikan hak-

hak dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Hal ini menuntut agar bisnis apapun perlu dijalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Perusahaan yang ingin berhasil dan bertahan lama, dalam kegiatan bisnisnya dituntut atau menuntut dirinya untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Kaitannya dengan ketiga lingkup diatas kepentingan stakeholders menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial adalah hal yang sangat konkret. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral dituntut dan sadar diri untuk melaksanakan tanggung jawab atas kepentingan pihak-pihak yang terkait tersebut diatas.

1.4.8 Prinsip-prinsip Dalam Etika Bisnis

Pendekatan *Stakeholders* merupakan relevansi sekaligus operasionalisasi dari etika bisnis, khususnya prinsip-prinsip etika bisnis dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, prinsip-prinsip itu juga sangat erat kaitannya dengan sisten nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Menurut Keraf (1998:74-80) prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Otonomi.

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis, bebas mengambil keputusan dan tindakan serta bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya juga dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan tindakannya tersebut.

2. Prinsip Kejujuran

Kejujuran sangat penting artinya bagi kepentingan semua pihak dan sangat menentukan kelangsungan bisnis selanjutnya. Prinsip bisnis tidak dapat bertahan lama dan berhasil bila tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Para

pelaku bisnis Modern harus sadar dan mengakui bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis baik dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing, sesuai aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain.

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar bisnis dijalankan dengan tetap menjaga baiknya atau nama baik perusahaan. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan agar tetap dipercaya, unggul dan tetap yang terbaik.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo dengan pertimbangan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan sektor usaha yang tidak bisa sepenuhnya dikelola secara bisnis, karena juga memiliki fungsi sosial terkait dengan fungsi pelayanan pemerintah atas kebutuhan masyarakat luas yaitu kebutuhan akan air bersih. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo memiliki sumber air yang cukup sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan baik.

1.5.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan diatas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan paradigma penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Dalam Moleong, 2000:3) merupakan suatu penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata dari subjek yang diamati. Paradigma penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam studi ini berusaha menggambarkan tentang hal-hal yang diteliti untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan tidak memisahkan hal-hal tersebut kedalam variabel yang deterministik seperti yang ditulis oleh (Moleong 2000:3) bahwa pendekatan sejenis diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Utuh) yaitu tidak memisah-misahkan fenomena sosial yang diteliti kedalam variabel-variabel secara deterministik.

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara utuh tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo.

1.5.3 Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan lebih dulu tetapi disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan .penentuan hanya dilakukan dalam pemilihan lokasi penelitian yang didasarkan pada keberadaan penelitian tersebut. Informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini adalah pihak-pihak yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keseragaman informasi yang diburu agar ada kejelasan tentang informasi itu sendiri.

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif yang berusaha menjanging informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber sehingga teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya. Dengan teknik ini maka informan dipilih secara sepihak sesuai dengan kebutuhan akan informasi tersebut.

Penentuan informan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Spradley yang disitir oleh Sanapiah faisal mengajukan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan sampel awal termasuk didalamnya penentuan informan yaitu:

- a. Subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas.
- b. Subjek yang masih terlibat dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran dan perhatian penelitian.
- c. Subjek yang mempunyai banyak waktu/ kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung dikemas terlebih dulu.
- e. Subjek yang pada mulanya tergolong masih asing dengan penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1) Drs. Bambang Supriyanggodo

Jabatan : Direktur Bidang Umum.

Tugas :

- a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan peralatan perlengkapan.
- c) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
- d) Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama.

2) Bpk. Kusmen.

Jabatan : Bagian Umum.

Tugas :

- a) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan.
- b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumahtanggaan, peralatan kantor dan perundang-undangan.
- c) Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum.

3) Dra. Herny Astuti.

Jabatan : Bagian Pelayanan Langgan.

Tugas :

- a) Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah.
- b) Mengusahakan pengembangan pelanggan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan pelayanan Perusahaan.
- c) Menerima dan memproses permohonan langganan, dan setelah ada persetujuan dari direktur teknik, memanggil kembali calon pelanggan untuk diminta persetujuannya.
- d) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memberikan penjelasan apabila ada pengaduan yang berkenaan dengan kerusakan pipa, kebocoran, air tidak keluar, atau hal lain yang berkenaan dengan pelayanan PDAM kepada pelanggan.
- e) Melaksanakan administrasi pelanggan secara tertib.
- f) Membuat laporan manajemen.

4) Ibu Sumiati (Pelanggan)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Wibisono 114 Ponorogo.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

1). Teknik wawancara.

Pengumpulan data primer dalam penelitian deskriptif dilakukan dengan menggunakan wawancara terbuka dan mendalam dan dituntun oleh pedoman wawancara. Teknik wawancara terbuka dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur terbuka, dengan maksud mengarahkan peneliti pada konteks permasalahan yang ditentukan dengan memberi kebebasan pada informan dalam memberikan informasi.

2). Teknik observasi.

Observasi dilakukan dengan secara non partisipatif didalam dan diluar perusahaan, yaitu mengamati terhadap situasi tertentu untuk memperoleh informasi tambahan dari sumbernya, sehingga dapat membantu peneliti dalam mendiskripsikan dan interpretasi data.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari kepustakaan dan dokumen-dokumen tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.6.5 Pemeriksaan keabsahan data

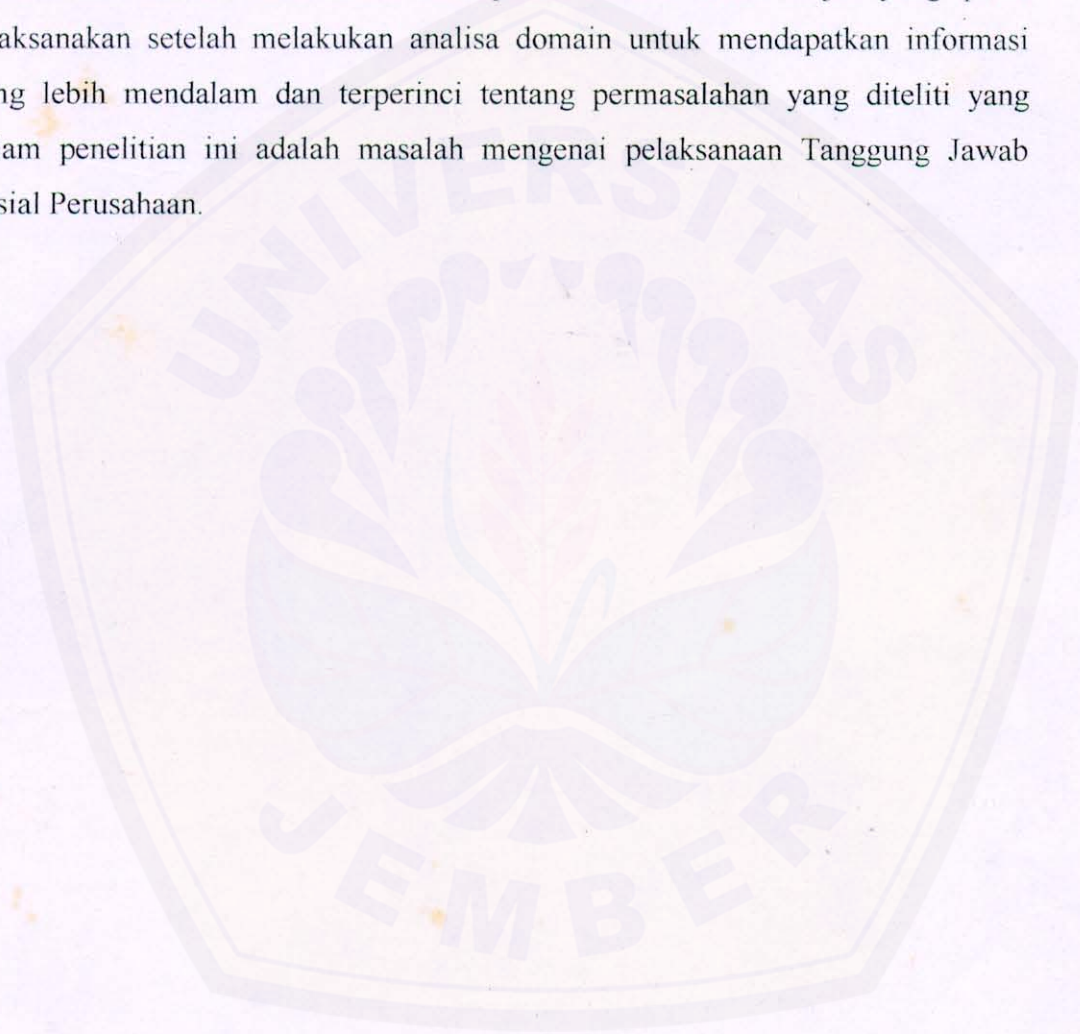
Pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai. Pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi yaitu menggali data dengan wawancara langsung, pengamatan dan studi kepustakaan, serta diskusi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

1.6.6 Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Artinya bahwa setiap gejala yang timbul serta keterkaitan antar gejala diungkapkan secara lebih mendalam dan terperinci dengan menggunakan analisa

deskriptif kualitatif secara sistematis. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa domain dan taksonomis.

Analisa domain merupakan proses analisa informasi yang sifatnya masih sangat umum dan menyeluruh terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian, seperti gambaran perusahaan, tujuan perusahaan, serta bentuk perusahaan. Analisa taksonomis merupakan analisa lebih lanjut yang perlu dilaksanakan setelah melakukan analisa domain untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci tentang permasalahan yang diteliti yang dalam penelitian ini adalah masalah mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.





II. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sarana air bersih merupakan salah satu kepentingan umum baik diperkotaan maupun dipedesaan dan mempunyai peranan yang cukup strategis karena mempunyai fungsi untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sistem penyediaan air minum dalam mendukung peningkatan taraf hidup dan kesehatan, diharapkan dapat menyediakan air minum kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan produksi dan kondisi yang dapat diandalkan baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas.

Meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan kota Ponorogo semakin mendorong Pemerintah Daerah Tingkat II Ponorogo untuk membangun proyek sarana air bersih dengan dana APBN yang dimulai pada tahun 1981/1982. Pada tahap awal proyek ini berupa pembuatan dua sumur pompa yang dibangun dijalan Sunan Ampel dan dijalan Menur dengan kapasitas 30 liter/detik untuk 150 sambungan rumah. Untuk pembangunan tahap selanjutnya sampai dengan tahun 1986 dana diperoleh dari APBN dan pembangunan mulai tahun 1987 diperoleh dari Bank Dunia.

Dengan selesainya pembangunan tahap I Proyek Sarana Air Bersih pada tahun 1982 tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat II Ponorogo memandang perlu dibentuknya suatu badan yang bertugas mengelola proyek tersebut sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Ponorogo. Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 024/KPTS/CK/III/82 tanggal 3 Maret 1982 dibentuklah Badan Pengelola Air Minum (BPAM) kabupaten Ponorogo. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan air bersih.

Seperti yang tercantum dalam Perda No.3 Thn 1992 tentang pendirian PDAM bahwa urusan penyediaan dan pelayanan air bersih sebenarnya merupakan urusan pemerintah pusat namun diserahkan pengoperasiannya pada Pemerintah Daerah tingkat II sebagai perwujudan otonomi daerah secara nyata. Berdasarkan

keputusan tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda tingkat II Ponorogo perlu meningkatkan status BPAM menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1992 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo yang pada saat itu dijabat oleh Drs.R.Gatot Soemani mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 1992 tentang pendirian PDAM Kabupaten Ponorogo.

2.2 Lokasi perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo berada di Jl. Pramuka No.21 Ponorogo.

2.3 Tujuan Perusahaan

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo seperti juga perusahaan-perusahaan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Namun tujuan yang terpenting seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati No. 589 Thn.1992 adalah memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara adil, merata dan terus-menerus dengan memenuhi standart kesehatan. Selain itu tugas utamanya adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

2.4. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.

PDAM sebagai perusahaan yang mengemban tugas untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta *Stakeholders* selalu berusaha untuk melakukan tugasnya dengan berpedoman pada visi dan misi perusahaan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 1992 yang dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Visi Perusahaan daerah Air Minum Ponorogo.

Visi PDAM Ponorogo adalah menciptakan PDAM yang sehat dan mandiri .

PDAM ponorogo berusaha untuk menciptakan perusahaan yang sehat baik

secara manajemen maupun dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu PDAM Ponorogo ingin menjadi perusahaan yang mandiri walaupun peran Pemerintah daerah masih dominan.

2.4.2 Misi Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo.

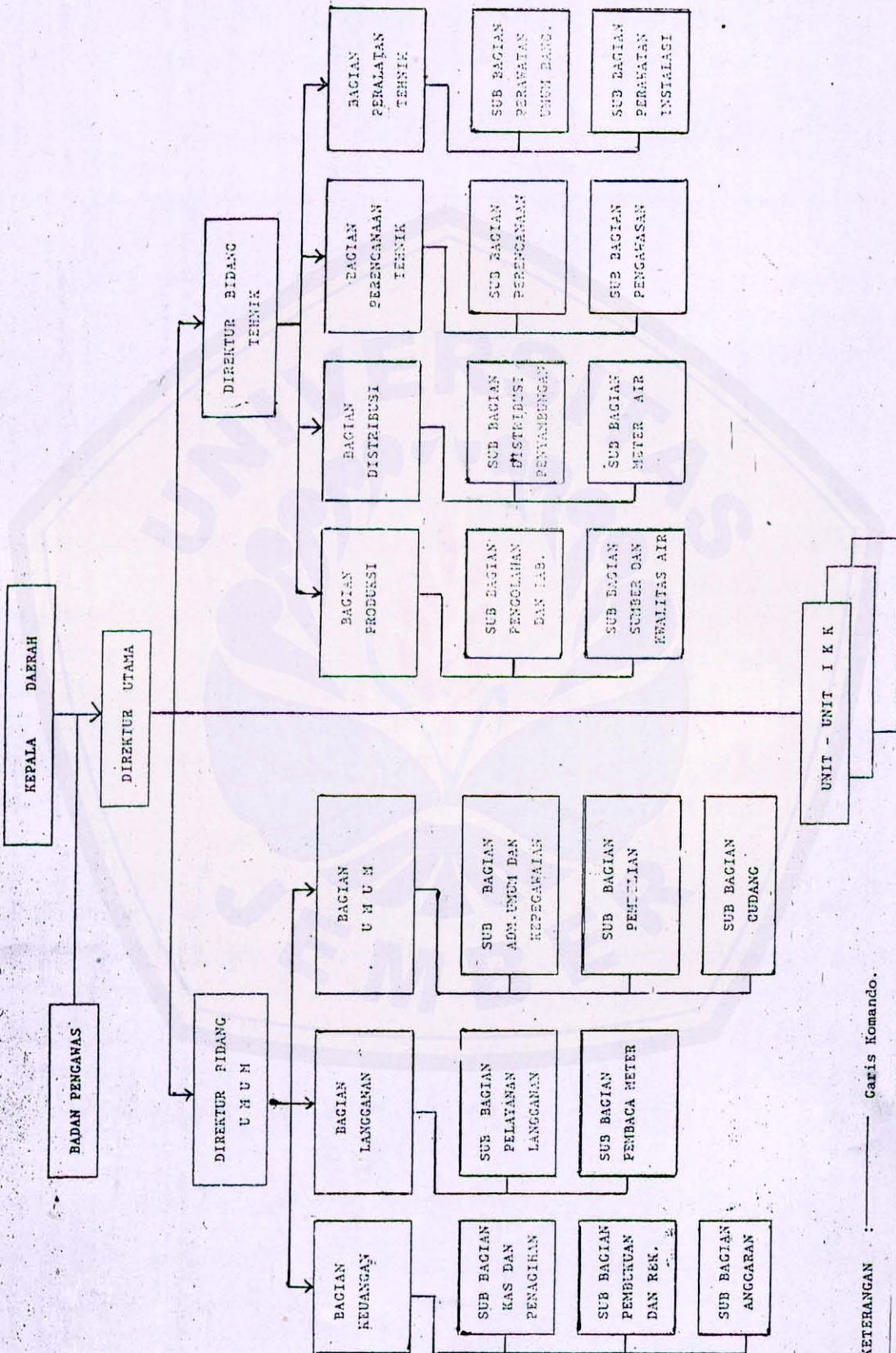
PDAM Ponorogo memiliki misi untuk mewujudkan tersedianya air bersih bagi masyarakat, membant mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat melalui pelayanan air bersih serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umumnya dan konsumen khususnya.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagai suatu perusahaan, PDAM Ponorogo dipimpin oleh dewan direksi dengan satu orang sebagai Direktur Utama dan maksimal dua orang sebagai direktur, yang didalam pelaksanaan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Tingkat II.

Pada saat ini PDAM Ponorogo memiliki 117 orang karyawan dengan status 4 orang pegawai negeri yang diperbantukan dari Pemda tingkat II Ponorogo, dan 113 orang lainnya berstatus pegawai perusahaan. Untuk 4 orang Pegawai Negeri yang diperbantukan dari Pemda tersebut mendapatkan gaji dari Pemda, sedangkan perusahaan memberikan honor dan tunjangan direksi. Untuk lebh jelasnya dapat dilihat dari struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Dibawah ini .

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO



KETERANGAN : _____ Caris Komando.

Sumber: PDAM Ponorogo 2002

- a. Peran Kepala Daerah disini adalah sebagai pemilik perusahaan. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atas pengelolaan perusahaan melalui Badan Pengawas.

Sedangkan uraian tugas tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal:
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan PDAM.
 - b. Melakukan pengawasan atas jalannya PDAM.
 - c. Menggunakan kebijaksanaan anggaran dan keuangan perusahaan.
2. Direktur Utama tugasnya:
 - a. Memimpin PDAM menurut wewenang berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Thn.1992.
 - b. Menetapkan rencana kerja PDAM yang disetujui Badan Pengawas.
 - c. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
 - d. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran dana pembangunan daerah.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.
3. Direktur Bidang Umum tugasnya:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan dibidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan.
 - b. Mengkoordinasikan pengadaan peralatan dan perlengkapan.
 - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, belanja dan kekayaan perusahaan.
4. Direktur Bidang Teknik tugasnya:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan teknik, produksi, dan distribusi peralatan teknik.
 - b. Mengkoordinasikan pemeliharaan instalasiproduksi, sumber mata air dan sumber mata air tanah.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahab kimia.

5. Bagian Keuangan tugasnya:
 - a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan.
 - b. Mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan.
 - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan sertapembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
6. Sub Bagian Kas dan Penagihan tugasnya:
 - a. Menerima hasil tagihan rekening dari penagih.
 - b. Menyetorkan hasil penagihan ke bank yang ditunjuk perusahaan.
 - c. Melaksanakan pembayaran dan penerimaan berdasarkan data yang ada.
 - d. Membuat cek untuk pengeluaran perusahaan.
 - e. Membuat cek untuk pengisian kembali kas kecil saat saldo minimum 10%.
 - f. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran kas.
 - g. Membuat laporan dan penerimaan kas kecil.
7. Sub Bagian Pembukuan dan Rekening tugasnya:
 - a. Memimpin dan mengatur pembagian kerja untuk pemegang jurnal, buku besar, dan pemegang buku pembantubiaya dan pendapatan.
 - b. Menyusun rekonsiliasi bank.
 - c. Menyusun penyajian laporan manajemen tentang operasional perusahaan tiap periode.
 - d. Menyusun dan menyajikan umur piutang yang telah disesuaikan dengan rekening opname tiap tahun untuk memudahkan perhitungan piutang dan untuk mengetahui kondisi piutang yang ada.
8. Sub Bagian Anggaran tugasnya:
 - a. Meneliti kebenaran bukti pembayaran untuk operasional perusahaan dan mencocokkan dengan anggaran yang telah disusun.
 - b. Menganalisa dan memberi kesimpulan dari data keuangan dan menyusun anggaran tahun berikutnya.
 - c. Menyusun konsep petunjuk operasional realisasi anggaran keuangan.

9. Bagian Langganan tugasnya:
 - a. Melakukan penyaluran meter air dan memeriksa penggunaan air berdasarkan meter.
 - b. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus rekening pelanggan.
 - c. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air.
10. Sub Bagian Pelayanan Langganan tugasnya:
 - a. Memberi penerangan kepada masyarakat.
 - b. Menerima dan memproses permohonan langganan.
 - c. Memberi pelayanan yang baik pada masyarakat dan memberi penjelasan bila ada pengaduan.
11. Sub Bagian Pembaca Meter tugasnya;
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan pembacaan meter unit-unit ibu kota kecamatan.
 - b. Memeriksa hasil pembacaan meter kemudian memindahkan angka meter dari stard meter langganan ke rekapitulasi (DSML).
 - c. Meneruskan daftar DSML ke sub bagian rekapitulasi untuk dibuatkan rekening.
 - d. Melaporkan meter yang rusak, tidak terbaca atau hal-hal lain.
12. Bagian Umum tugasnya :
 - a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi kepegawaian dan kesekretariatan.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumah tanggaan, peralatan kantor dan perundang-undangan.
 - c. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknis.
13. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian tugasnya :
 - a. Mengawasi dan tanggung jawab atas pengetikan dan mengagendakan surat.
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.

- c. Mendistribusikan laporan manajemen setiap bagian badan pengawas dan instalasi yang terkait.

14. Sub Bagian Pembelian tugasnya :

- a. Melakukan hubungan dengan para subplier.
- b. Meneliti syarat-syarat administrasi pembelian.
- c. Melaksanakan pembuatan pesanan pembelian daftar permintaan barang.
- d. Menghubungi sublier untuk pemesanan pembelian.

15. Sub Bagian Gudang tugasnya :

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh administrasi gudang.
- b. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian pembelian untuk pengadaan barang dan bahan kebutuhan perusahaan.
- c. Menerima dan mengecek barang dari supplier.
- d. Mengeluarkan barang berdasarkan bukti pengeluaran barang yang telah disetujui.
- e. Melakukan stock opname barang pada waktu yang teratur.
- f. Membuat laporan bulanan mengenai keadaan barang.

16. Bagian Produksi tugasnya:

- a. Menyelenggarakan pengendalian atas kuantitas dan kualitas produksi air.
- b. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas dan laboratorium.

17. Sub Bagian pengolahan dan laboratorium tugasnya :

- a. Mengatur jadwal kegiatan dan operasi instalasi pengolahan air dan mengawasi pelaksanaannya.
- b. Mengawasi proses pengolahan air dan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Memberi laporan kepada sub bagian pemeliharaan bila terjadi kerusakan peralatan dan instalasi.
- d. Mengawasi penggunaan dan pencampuran bahan-bahan kimia.

18. Sub bagian Sumber dan kualitas air tugasnya:

- a. Mengendalikan kualitas dan kuantitas produksi air.
- b. Mengadakan penyediaan bahan kimia.

- c. Melaksanakan analisa dan bakteriologi sehingga mutu air dapat dipertanggungjawabkan.

19. Bagian Distribusi tugasnya:

- a. Mengawasi pemeliharaan dan pemasangan pipa distribusi.
- b. Mengkoordinir dan melaksanakan pemasangan sambungan baru.
- c. Meneliti pipa yang tidak resmi.

20. Sub bagian distribusi dan penyambungan tugasnya:

- a. Melaksanakan pengoperasian dan memeriksa jaringan pipa transmisi agar distribusi berjalan baik.
- b. Melaksanakan pemutusan dan penyambungan kembali berdasarkan perintah direktur teknik.
- c. Mencari dan meneliti tempat kebocoran dan mencari penyebabnya.
- d. Memeriksa jalur transmisi distribusi dan sambungan dinas secara periodik.

21. Sub bagian Meter air tugasnya:

- a. Menguji dan memeriksa air yang akan dipasang pada sambungan pelanggan dan memperbaiki meter yang rusak.
- b. Memasang segel pada semua meter air pelanggan baik yang sedang dipasang maupun yang telah diadakan perbaikan.
- c. Melaksanakan perbaikan pemeliharaan dan perawatan seluruh meter air.

22. Bagian perencanaan teknik tugasnya:

- a. Mengadakan persediaan air minum untuk keperluan distribusi.
- b. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas air.
- c. Mengadakan penyediaan air minum untuk program penyambungan dan pengawasan pendistribusian.

23. Sub bagian perencanaan tugasnya:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi pembuatan gambar oleh juru gambar seperti gedung jaringan pipa atau sambungan baru.
- b. Menentukan jumlah keperluan dan kualitas bahan yang diperlukan.

- c. Mengikuti perkembangan proyek yang sedang dikerjakan baik dikerjakan sendiri maupun dikerjakan oleh kontraktor
24. Sub Bagian Pengawasan tugasnya:
- a. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan konstruksi dan pelaksanaan proyek lapangan.
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang dibuat bagian perencanaan teknik.
 - c. Melaporkan bila terjadi penyimpangan dari rencana yang ditetapkan.
25. Bagian Perelatan Teknik tugasnya:
- a. Mengurus perbekalan materi dan perawatan teknik.
 - b. Menguji meneliti dan menilai peralatan teknik
 - c. Merencanakan penegadaan sarana air minum untuk program pembangunan dan mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian.
26. Sub Bagian Perawatan Umum Bangunan tugasnya:
- a. Memeriksa dan mengatur pemeliharaan secara berkala terhadap semua unit kantor.
 - b. Mengawasi dan mengkoordinir perbaikan yang perlu segera dilaksanakan.
27. Sub Bagian Instalsi tugasnya:
- a. Memeriksa dan mengatur pemeriksaan serta mengkoordinir pelaksanaan dan perawatan instalasi air mesin-mesin meter air dan pompa air
 - b. Melaksanakan perbaikan peralatan dan perlengkapan pipa distribusi dan air.
 - c. Melakukan pemeliharaan terhadap semua peralatan perusahaan.
28. Unit Ibu kota Kecamatan tugasnya:
- a. Menggunakan semua materi dan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.
 - b. Menyampaikan laporan pereodik kepada direksi PDAM mengenai pelaksanaan kegiatan operasional di unit ibukota kecamatan.

Demikian tadi uraian tugas-tugas bagian di PDAM kabupaten Ponorogo yang saat ini dibawah pimpinan Sunarto.SW.SH.MM berusaha untuk memberikan pelayanan optimal untuk menekan seminimal mungkin pengaduan dari pelanggan.

1.6 Kegiatan Personalia.

1.6.1 Jumlah dan Jenjang Pendidikan Karyawan.

Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo saat ini memiliki 117 orang karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang jumlah karyawan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah karyawan menurut tingkat pendidikan pada PDAM Ponorogo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1 dan S2	3 Orang
2.	SMA/ STM	95 Orang
3.	SMP	8 Orang
4.	SD	7 Orang
	Jumlah	117 Orang

Sumber: PDAM Ponorogo 2002

2.6.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan

PDAM Ponorogo memberlakukan sistem 5 hari kerja. Hal ini menyesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dalam satu hari kerja terdapat 7 jam kerja dan 1(satu) jam istirahat. Untuk hari Jumat terdapat 6 jam kerja dan 2 (dua) jam istirahat. Tujuan diadakannya jam istirahat adalah untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk makan siang melaksanakan kegiatan lain misalnya melaksanakan ibadah sholat bagi karyawan yang beragama Islam.

Jam kerja dinas pada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ponorogo secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Jam kerja karyawan PDAM Ponorogo.

No.	Hari Dinas	Jam Dinas	Istirahat
1.	Senin Sampai Kamis	07.00 – 15.00	12.00 – 13.00
2.	Jumat	07.00 - 15.00	11.00 - 13.00

2.6.3 Sistem Gaji

Untuk sistem gaji pegawai PDAM, seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan No.11 Tahun 1996 tentang Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Dati II Ponorogo dalam bab III disebutkan bahwa kepegawaian yang diangkat dalam suatu pangkat menurut keputusan ini diberikan gaji pokok menurut golongan/ ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu. Sedangkan untuk pegawai percobaan diberi gaji pokok sebesar delapan puluh perseratus dari gaji pokok.

Selain itu kepada pegawai diberikan kenaikan gaji berkala yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku setiap masa kerja 2 (Dua) tahun apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Menurut penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan pimpinan cabang) dengan baik.
- b. Telah mendapat masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- c. Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

2.6.4. Fasilitas Untuk Karyawan

a. Tunjangan-tunjangan.

Untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan para karyawannya, perusahaan juga memberikan berbagai macam tunjangan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo No. 11 Thn 1996 maka tunjangan-tunjangan yang diberikan diantaranya adalah:

1) Tunjangan Keluarga.

Besarnya tunjangan keluarga yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo No. 02 Thn 2002.

2) Tunjangan Pengobatan/ kelahiran/ kematian (Astek/ Askes).

Pemberian tunjangan ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo No. 25 Thn.1999.

3) Tunjangan beras / Natura.

Besarnya tunjangan beras/natura yang diberikan perusahaan diatur dalam pasal 4 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo No. 25 Thn.1999.

4) Tunjangan Jabatan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo No. 29 Thn.2002, tunjangan jabatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai perusahaan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian, Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Unit IKK, dan kepala Sub bagian.

5) Tunjangan Kompensasi kerja

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo No. 25 Thn 1999, maka perusahaan memberikan tunjangan kompensasi kerja kepada pegawai/ karyawan perusahaan yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan golongannya.

b. Program Pensiun.

Selain diberikan tunjangan-tunjangan, perusahaan juga mengikutsertakan seluruh karyawan tetap perusahaan yang telah bekerja selama 4 tahun dalam program pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI). Hal ini sebagai wujud rasa terima kasih perusahaan kepada karyawan yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.

c. Cuti.

Selain pemberian berbagai macam tunjangan dan dana pensiun, perusahaan juga memberikan hak cuti kepada karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan juga peduli akan kepentingan karyawannya. Ketentuan tentang hak cuti tersebut telah diatur dalam Bab X Surat Keputusan No.11 Thn 1996. Cuti yang diberikan oleh perusahaan diantaranya adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting.

1) Cuti Tahunan.

Cuti tahunan diberikan pada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (Dua Belas) hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan ini karyawan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

2) Cuti Besar.

Cuti Besar diberikan pada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun secara terus menerus. Karyawan yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. Untuk mendapatkan cuti besar ini karyawan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

3) Cuti Sakit.

Karyawan yang sakit selama 1 (Satu) atau 2 (Dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan ia harus memberitahukan kepada atasannya. Karyawan yang sakit lebih dari 2 (Dua) hari sampai dengan 14 (Empat Belas) hari dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi dengan melampirkan Surat

Keterangan Dokter. Bagi karyawan yang sakit lebih dari 14 (Empat Belas) hari dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi. Lamanya cuti yang diberikan paling lama satu tahun. Bila belum sembuh maka yang bersangkutan diperiksa kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan karyawan yang bersangkutan belum sembuh, maka ia diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang tunggu.

4) Cuti Bersalin.

Karyawan wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 (Satu Setengah) bulan. Untuk persalinan anak pertama dan kedua, karyawan wanita berhak atas cuti bersalin. Sedangkan untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan perusahaan. Lamanya cuti bersalin adalah 1 (Satu) bulan sebelum dan 2 (Dua) bulan sesudah melahirkan.

5) Cuti karena Alasan Penting.

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit atau meninggal dunia, atau yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang pertama, atau alasan lain yang ditetapkan kemudian oleh Direksi. Lamanya cuti yang diberikan maksimal 2 (Dua) bulan.

d. Lapangan Olah Raga.

Perusahaan juga menyediakan sarana olahraga untuk para karyawan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan tetap terjaga staminanya. Dengan demikian akan membuat pikiran lebih jernih sehingga dapat menambah semangat kerja. Sarana olah raga yang tersedia diantaranya lapangan Volley, Tenis Meja dan lapangan Sepak Bola.

e. Perpustakaan.

Untuk menambah pengetahuan dan menyalurkan minat baca para karyawan, perusahaan juga memberikan fasilitas perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat terus meningkatkan pengetahuannya, sehingga diharapkan mutu Sumberdaya Manusia yang ada diperusahaan dapat terus meningkat.

f. Masjid.

Untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang mayoritas beragama Islam, perusahaan menyediakan masjid yang dibangun di lingkungan perusahaan. Pada bulan puasa biasanya diadakan buka puasa dan sholat tarawih bersama seluruh karyawan. Hal ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi yang baik antar seluruh karyawan perusahaan.

g. Kantin.

Dilingkungan perusahaan juga disediakan kantin. Hal ini dimaksudkan agar karyawan yang rumahnya jauh tidak perlu pulang saat makan siang, sehingga pada saat jam istirahat selesai karyawan tidak terlambat untuk kembali bekerja.

2.7 Tata Tertib Dislipin Kerja Karyawan.

Untuk menciptakan suasana kerja yang tertib dan dinamis, maka perusahaan membuat peraturan yang berbentuk tata tertib disiplin kerja karyawan yang didalamnya berisi kewajiban dan juga larangan untuk seluruh karyawan perusahaan. Untuk lebih jelasnya isi dari tata tertib tersebut adalah sebagai berikut:

2.7.1 Kewajiban Setiap Karyawan

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan negara, pemerintah dan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perusahaan.

- d. Menyimpan rahasia perusahaan, rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan kerja sama, persatuan dan kesatuan pegawai perusahaan.
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya.
- j. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing.
- k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
- n. Mendorong bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, untuk meningkatkan prestasi kerja.
- o. Menjadi teladan sebagai Warga Negara yang baik dalam lingkungan masyarakat.
- p. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- q. Menaati ketentuan jam kerja dan menciptakan serta memelihara suasana kerja yang baik.
- r. Wajib menandatangani daftar hadir/ absen pagi dan sore sesuai ketentuan.

2.7.2 Larangan Bagi Setiap Pegawai

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai yang bersangkutan.
- b. Menyalahgunakan wewenangnya.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau negara.

- d. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik perusahaan.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik perusahaan secara tidak sah.
- f. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
- h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- i. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan atau negara misalnya: Berjudi, mencuri, atau melakukan tindak pidana lainnya.
- j. Menghalangi jalannya tugas kedinasan.
- k. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan.
- l. Memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat pegawai PDAM kecuali untuk kepentingan jabatan.
- m. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dalam jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan pihak lain.

2.8 Sistem Penyediaan Air Bersih

Pada awalnya sistem pendistribusian air bersih dengan cara mengambil air dari sumur (Deopweel) yang berkapasitas 30 liter/detik yang dipompakan langsung ke pompa tranmisi dan didistribusika dengan memberi injeksi larutan kaporit. Larutan ini berfungsi sebagai desinfektan yang diberikan pada air keluar pompa dengan menggunakan dess eringpump. Namun setelah selesainya

pembangunan kantor baru yang berada di jalan Sunan Ampel No. 21 pada tanggal 21 Juni 1989 yang dilengkapi dengan menara air (water torn) maka sistem pendistribusian air dapat lebih lama (sebelumnya air hanya mengalir pada jam-jam tertentu) selain itu tingkat kebocoran air dapat dikurangi. Jumlah kapasitas produksi air per hari adalah 7452 m³ perhari dengan kapasitas yang disalurkan kepada pelanggan sebesar 6334,2 m³ per hari, sedang sisanya merupakan air yang hilang akibat adanya kebocoran yang besarnya sekitar 15% dari kapasitas air yang diproduksi.

Pada saat ini PDAM Ponorogo telah mampu melayani 13 kecamatan, dari 20 kecamatan yang ada di Ponorogo. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut maka dibentuk unit-unit PDAM di tiap Ibu Kota kecamatan yang disebut dengan IKK sebagai pengendali di tiap-tiap kecamatan namun pengendali pusat tetap berada di kantor PDAM Ponorogo yang berada di kecamatan kota.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan Pembahasan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan didalam menjalankan usahanya sudah semestinya bersikap tanggap dan peduli terhadap lingkungan disekitarnya. Kegiatan tersebut selain merupakan tuntutan bisnis juga merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan memang sulit dipisahkan dari keuntungan ekonomis , tetapi pada kenyataannya keterlibatan sosial tersebut sangat menunjang kegiatan bisnis perusahaanyang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan itu sendiri.
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PDAM Ponorogo diwujudkan dalam kegiatan seperti memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan pada musim kemarau yang sering terjadi dibeberapa kecamatan yang ada dikabupaten Ponorogo, dan memenuhi hak-hak *Stakeholders* yakni karyawan, konsumen, pemerintah serta masyarakat.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo sebagai organisasi bisnis telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dilakukan karena selain bertujuan untuk memperoleh laba, PDAM juga berperan sebagai agen pembangunan dengan memberikan pelayanan berupa air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



4.2 Saran

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi, karena hal ini akan sangat membantu eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Sarana-sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan –kegiatan sosial maupun operasional perlu ditambah agar pelayanan yang diberikan kepada konsumen maupun masyarakat dapat lebih baik.



DAFTAR BUSTAKA

Cannon, T. 1995. *Tanggung Jawab Perusahaan*. Jakarta. PT. Elek Media Komputindo.

Engel, JFRD Blakwell, PW Miniard. 1994. *Prilaku Konsumen*. Jakarta. Binarupa Aksara.

Faisal, S. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya . PT. Bina Ilmu.

Gito Sudarmo, I. 1992. *Pengantar Bisnis (Edisi II)*. Yogyakarta BPFE UGM.

Indrawijaya, A. 1989. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung. Sinar Baru.

Hughes, RJ dan Kapoor. 1985. *Bussines*. New Jersey. Houghthon Miffin Company.

Irawan & Reksohadiprodo, 1982. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta. BPFM UGM.

Keraf, S. 1991. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta. Kanisius.

-----, 1998. *Etika bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Kanisius.

Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Siagian, SP. 1996. *Etika Bisnis*. Jakarta. PT. Pustaka Binaman Presindo.

Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.

Artikel:

Francisia. 1992. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Dalam manajemen dan Usahawan Indonesia. Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta UI Pers.

Nusantara. 1992. *Mengapa Harus Ada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia. Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta UI Pers.

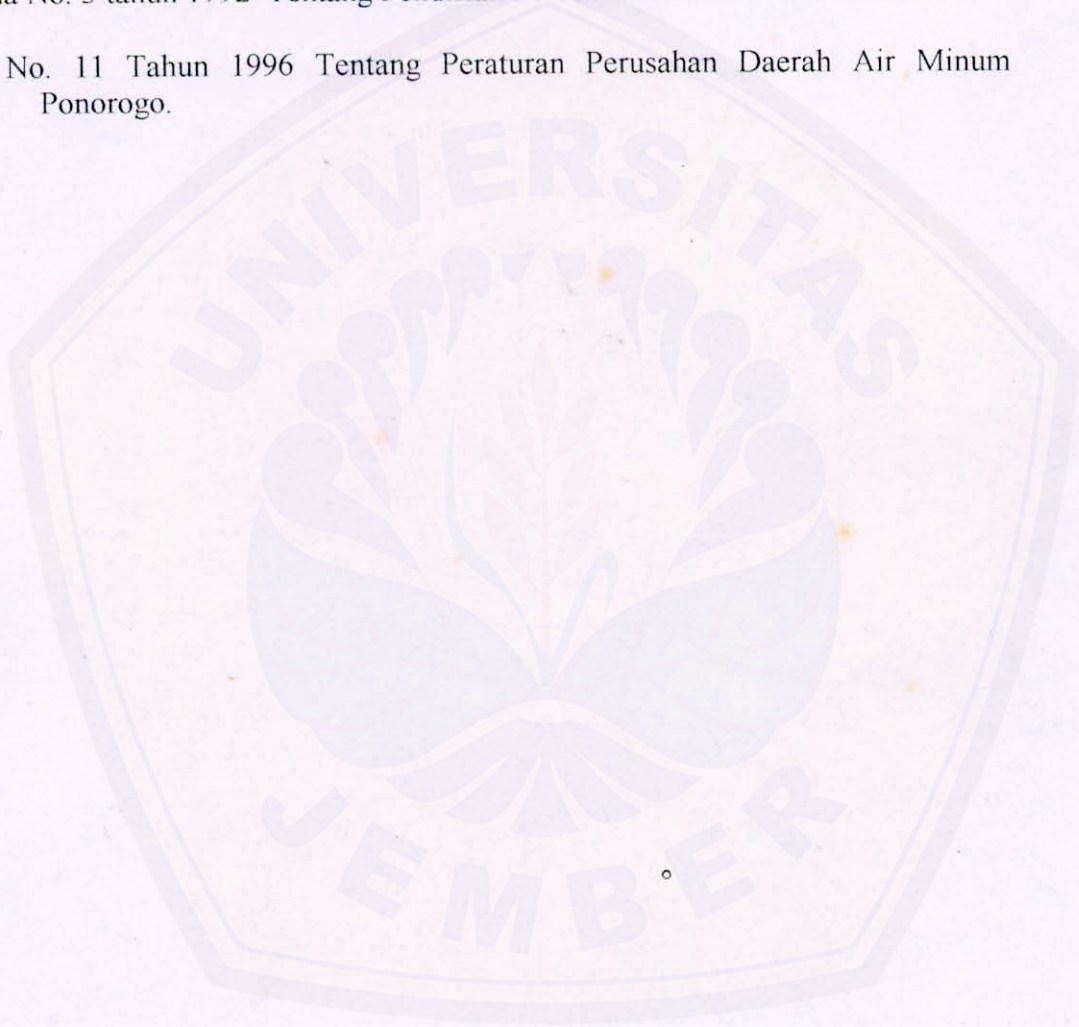
Riza, I. 2000. *Tanggung Jawab Sosial Agenda Bisnis Global*. Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia. Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta UI Pers.

Sulistyarini dan Mirza. 1997. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebuah Opini*. Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia. Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta UI Pers.

Sigit Hotomo. 1997. *Strategi Perusahaan Dalam Menghadapi Isu Lingkungan*. Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia. Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta UI Pers.

Perda No. 3 tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

SK No. 11 Tahun 1996 Tentang Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Deskripsi Perusahaan.

1. Gambaran awal perusahaan.
 - a. Nama perusahaan.
 - b. Bentuk perusahaan.
 - c. Lokasi perusahaan.
 - d. Jenis kegiatan perusahaan.
2. Latar belakang pendirian perusahaan.
3. Sumber Daya Manusia.
 - a. Tenaga kerja.
 - b. Tingkat pendidikan.
4. Organisasi dan Manajemen.
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang.
 - b. Visi, dan Misi dan perusahaan.

B. Deskripsi permasalahan.

Tanggung jawab sosial perusahaan.

1. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial menurut perusahaan dan bagaimana perusahaan memandang hal tersebut.
2. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan selama ini dalam melaksanakan tanggung jawab sosial itu.
3. Bagaimana perusahaan memandang keuntungan ekonomis.
4. Apa saja cara yang ditempuh untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Terhadap karyawan.

1. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap karyawan.
2. Bagaimana cara memenuhi hak- hak karyawan tersebut.
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Terhadap konsumen.

1. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap konsumen.
2. kegiatan-kegiatan apa saja yang termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen dan bagaimana caranya.
3. Apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Siapa yang bertanggung jawab dengan masalah tersebut.

Terhadap Pemerintah.

1. Apa saja peraturan-peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan.
2. Bagaimana perusahaan melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.
3. Bagaimana dukungan perusahaan terhadap program pemerintah.

Terhadap Masyarakat Sekitar.

1. Bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat disekitar perusahaan.
2. Apakah perusahaan memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.
3. Program apa saja dan bagaimana cara melaksanakannya.
4. Apa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 337818, 339385 Fax. (0331) 337818 Jember 68121
E-mail : lemlit_unej @ jember.telkom.net.id

Nomor : 846 /J25.3.1/PL.5/2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

30 Juli 2002

Kepada : Yth. Sdr. Pemimpin
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo
di -

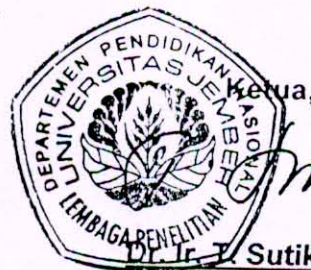
P O N O R O G O .

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 2405/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 29 Juli 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : RINI MARTINA / 00-2321
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Ektensi (ADNI)
Alamat : Jl. Wibisono 116 A Ponorogo.
Judul Penelitian : Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (P D A M) Kab.- Dati II Ponorogo.
Lokasi : PDAM Ponorogo.
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

Maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jl. Pramuka No. 21 Telepon 481870
P O N O R O G O

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2/243/417.57/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : Rini Martina
N I M : 200 - 2321
Jurusan/Program : Administrasi /Administrasi Niaga
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah mengadakan penelitian di tempat kami dengan judul "*Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*" pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 September 2002

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN PONOROGO

Direktur Umum



DR. BANG SUPRIYANGGODO

Penata

Nip. 010 247 085



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PONOROGO
Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0352) 481870
PONOROGO

JADWAL MINGGUAN PENGIRIMAN AIR TANGKI
KE DAERAH KEKERINGAN
BULAN : AGUSTUS 2002

NO.	HARI	LOKASI	SATUAN	JUMLAH
1	SENEN	TRENCENG/JENANGAN	RIT	3
		KR. PATIHAN/PULUNG	RIT	1
2	SELASA	NGIDENG/SAWOO	RIT	2
3	RABU	TRENCENG/JENANGAN	RIT	3
4	KAMIS	KR. PATIHAN/PULUNG	RIT	1
5	JUMAT	TRENCENG/JENANGAN	RIT	3
		NGIDENG/SAWOO	RIT	2

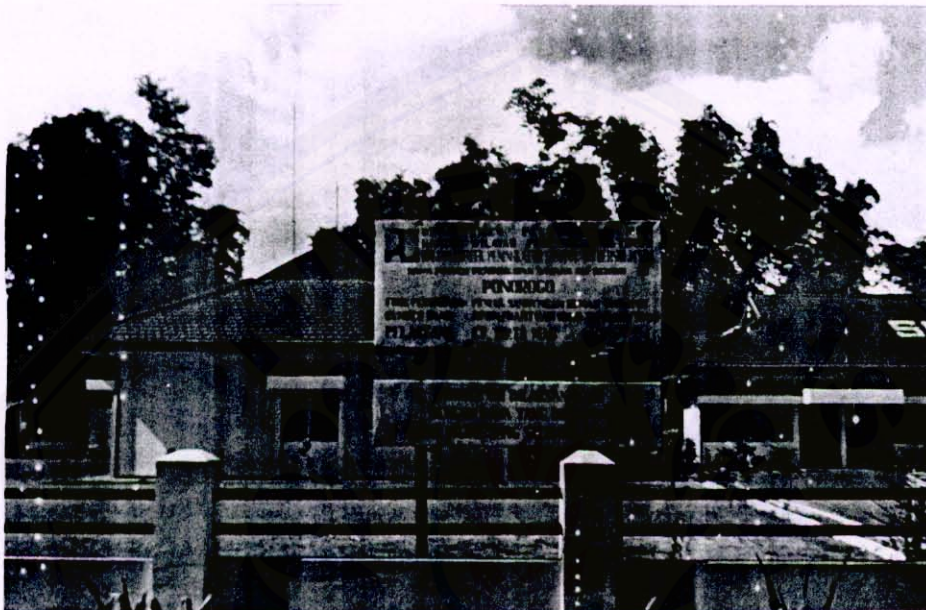
Ponorogo, 1 Agustus 2002

Bagian Hubungan Langgan:



Dra. HERNY ASTUTI
NIP. 510 115 112

Gambar Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Ponorogo



JEMBER

Gambar salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan



 Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

